



Pelaksanaan PKK di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir (Studi Kasus Pokja: Pendidikan dan Keterampilan)

Mirna, Nellis Mardhiah

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 08, 2021
Revised: February 19, 2022
Available online: June 15, 2022

KEYWORDS

Implementation, PKK, Education, Skill

CORRESPONDENCE

Name: Nellis Mardhiah
E-mail: nellismardhiah@utu.ac.id

A B S T R A C T

Family Welfare Empowerment (PKK) is a women-only social organization. The PKK was founded for the welfare of the family, because the family is the community that builds the nation. The purpose of this study is to explain and describe how family welfare empowerment activities (PKK) policies are implemented in work programs in the field of education and skills in Suak Puntong Village, Kuala Pesisir District, Nagara Raya Regency. The research method used was qualitative research with a case study approach. The findings of this study indicate that the existing Pokja II education and skills program, such as sewing training for the community, cooking training, making wedding delivery baskets, stringing Acchinese betel nut, arranging flowers, and other hand skills useful in people's daily lives, is being implemented quite well. This can be seen in the existing sewing, handicrafts, and cooking programs, but their implementation is not carried out properly due to a variety of obstacles, including the replacement of village heads every period with the person in charge (PJ), which results in policies that are not carried out optimally when implemented.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu organisasi kemasyarakatan desa dengan keterlibatan partisipasi perempuan dalam upaya merealisasikan kesejahteraan keluarga dengan 10 Program Pokok (POKJA) PKK (Pakudek et al., 2019). Usaha mencukupi kebutuhan pokok masyarakat agar masyarakat memiliki kesejahteraan keluarga merupakan upaya dari 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun (2020) tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan adanya 10 program, struktur organisasi PKK terdiri dari ketua dan wakil ketua PKK dan kelompok kerja (POKJA) yaitu ialah Pokja I mengurus khusus bidang pengalaman dan penghayatan pancasila, Pokja II mengurus bidang pendidikan dan keterampilan, Pokja III mengurus bidang tata laksana rumah tangga, sandang dan pangan, Pokja IV mengurus bidang kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perencanaan sehat serta Pokja V mengurus bidang kehidupan berkoperasi, pengembangan usaha ekonomi keluarga (Widyawati, 2021)

Peraturan Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat manusia itu sendiri (Nasution, 2016). Pendidikan menjadikan manusia lebih baik dengan sikap, adab serta pengetahuan yang dimilikinya. Ini sejalan dengan fungsi Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mempunyai fungsi utama dalam mengembangkan karakter manusia mejadi lebih

beradab, budaya serta kemampuan dari diri masyarakat menjadi lebih baik lagi tujuannya untuk mengasah potensi yang ada di dalam diri seseorang menjadikannya manusia yang cerdas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat masih belum optimal sehingga dibandingkan negara lain Indonesia masih tertinggal (RI, 2003).

Perkembangan perekonomian global yang menjadi faktor pendukung terhadap majunya suatu bangsa adalah dengan penguatan manusia menjadi sumber daya bermutu dapat mengatasi beragam problem baik ekonomi, sosial, politik serta permasalahan lainnya (Inanna, 2018). Pendidikan memberikan pembangunan bagi masyarakat agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dalam mengikuti perubahan globalisasi sehingga masyarakat yang berpendidikan dapat diuntungkan baik dalam ketenagakerjaan, birokrasi dan sosialnya (Sujana, 2019). Disisi lain (Yayan Alpian et al., 2019) juga menambahkan bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam upaya pengembangan potensi yang ada pada dirinya namun harus sesuai dengan berlakunya ketetapan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2016) menyatakan bahwa problematika yang biasanya terdapat dalam pendidikan di Indonesia ialah kesenjangan pendidikan yang terjadi karena kualitas guru sebagai tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang belum memadai terlebih di daerah pedesaan dan dimensi kepemimpinan yang juga mempengaruhi pemahaman masyarakat. Kualitas pendidikan suatu bangsa merupakan hal terpenting dalam memajukan suatu bangsa. Kunci pembangunan nasional yaitu dengan pendidikan, namun dalam implementasi berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pendidikan merupakan hal yang sulit ditangani kendatipun seperti itu ikhtiar pemerintah dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan harus kita hargai.

Aceh diberikan keistimewaan daerahnya dengan kesatuan masyarakat sehingga dapat mengurus serta mengatur segala apa yang di anggap penting dalam pemerintahan sendiri sesuai yang dipimpin oleh Gubernur berdasarkan Qanun aceh Nomor 11 tahun 2014. Aceh juga mempunyai kewenangan dalam mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta otonomi khusus yang berlaku di Aceh (Amin, 2018). Penelitian (Fajri et al., 2021) menyimpulkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembelajaran di Aceh sudah sejalan dengan Qanun yang berlaku di daerah istimewa Aceh atau disebut dengan Seuramoe Mekkah ini dengan menggunakan kurikulum syariat islam dan juga mengacu pada pendidikan Nasional. Namun Penelitian yang dilakukan oleh (Dedi Saputra, 2015) menyimpulkan bahwa rata-rata provinsi Aceh memiliki ketimpangan pendidikan 0,262, yang artinya ketimpangan pendidikan masih rendah dengan ketimpangan pendidikan yang dipengaruhi oleh pengeluaran kewajiban pemerintah sektor pendidikan yang independen, kesenjangan pendidikan yang juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk independen dan independen tingkat kemiskinan.

Bersamaan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, dalam hal ini pemerintah juga meningkatkan pendidikan sumber daya manusia di tingkat Desa sebagai suatu unit terkecil yang harus dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberdayakan masyarakat. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan membuat suatu organisasi kemasyarakatan yang di khususkan bagi perempuan di lingkup Desa guna menyejahterakan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diartikan suatu kondisi terpenuhi kebutuhan anggota keluarga yaitu kebutuhan dasar baik keagamaan bermanfaat, kelayakan hidup, keuangan, mental dan sosial masyarakat. (Fuady, 2016). Menurut (Anggraini, 2016). PKK ialah upaya pemerintah agar perempuan aktif berperan dalam masyarakat dan berbangsa. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di Desa, dimana perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Adapun tujuan PKK yaitu untuk kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh pada kinerja asifikasi sebuah bangsa. PKK sanggup menuntun masyarakat dengan bekal keterampilan serta pengetahuan dan kapasitas asli perempuan yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat (Rahmawati, 2019).

Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya mempunyai lembaga PKK yang mulai ada semenjak berdirinya Desa Suak Puntong tersebut pada tahun 1960 yang lalu. Terbentuknya PKK di Desa Suak Puntong dianggap penting, dimana harapan masyarakat Desa Suak Puntong akan lebih maju. PKK juga memiliki aset yaitu perkebunan kelapa, pelaminan, piring dan ayunan yang disewakan. Masyarakat Desa Suak Puntong sebagian utama bermata pencaharian berkebun, penghasilan yang tidak menentu dalam kehidupan sehari-hari mengakibatkan rendahnya faktor ekonomi. Upaya dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat salah satunya pelaksanaannya dimaksud agar dapat meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih unggul dimuat dalam pokja II. Pokja II di Desa ini diantaranya pelatihan menjahit, kerajinan tangan serta pelatihan memasak. Dengan peningkatan pendidikan dan

keterampilan masyarakat mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Pelaksanaan program tersebut ditinjau dalam aspek atau model implementasi kebijakan publik.

Menurut Hoogerwerf (1979:7) kebijakan merupakan suatu upaya tertentu yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sementara itu suatu keputusan dan tindakan yang dibuat oleh instansi serta pemngku pemerintahan disebut dengan kebijakan pemerintah (Kartawidjaja, 2018, p. 32). Menurut (Mardhiah, 2017) kebijakan adalah aturan tertulis yang mengatur sikap serta tingkah laku dan bersifat mengikat bagi semua anggota dalam suatu organisasi untuk menciptakan masyarakat dengan tata nilai yang baru. Pelaksanaan suatu kebijakan disebut implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan yang ada untuk memperoleh output yang maksimal (Haerul et al., 2016).

Implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horm (1975) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan upaya terarah baik itu pribadi, umum maupun khusus mencapai sasaran dan tujuan dari suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya. ini searah pada pernyataan Jones (1984:168), yaitu keterlibatan dalam implementasi kebijakan bukan hanya birokrat saja, artinya banyak orang warga negara, hakim dan pihak lainnya yang keberadaannya wajib diikutsertakan (Kartawidjaja, 2018, p. 80). Pelaksanaan kebijakan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan tersebut dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi, Mohammad Ibnu, 2015)

Model proses implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horm (1975:87), kebijakan merupakan pengambilan keputusan dari berbagai rangkain kebijakan dengan lebih menekankan kualitas dari kebijakan pada saat implementasi kebijakan dilakukan. Keterhubungan apakah keputusan yang diambil sudah menjadi solusi dari isu yang terjadi, dan konsepnya keterhubungan pelaksanaan kebijakan dengan kinerja pelaksana kebijakan. adanya variabel yang saing berhubungan dalam implementasi di anggap berhasil dengan adanya kepatuhan dalam menjalankan kebijakan, adanya kontrol kebijakan dan prosedur perubahan yang baik. (Kartawidjaja, 2018, p. 83). Kapasitas kebijakan, pelaksana kebijakan dan kelompok tujuan, maupun lingkungan tempat implementasi kebijakan yang secara umum menjadi variabel pendorong suksesnya pelaksanaan keputusan (Kartawidjaja, 2018, pp. 83-84).

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa program PKK Desa Suak Puntong dalam pelaksanaannya mengalami kendala kurangnya pemahaman anggota PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi PKK, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan yang disebabkan kurangnya anggaran untuk menjalankan kegiatan akibat dari Covid-19 sehingga program PKK terhambat terutama kelompok-kelompok kerja.

Biaya operasional PKK untuk makan dan ATK sebesar Rp.5.000.000 dan biaya kegiatan PKK bersama PKK Desa dengan PKK Kecamatan dan Kabupaten sebesar Rp.10.000.000. Dana tersebut juga berikan kepada ke dalam 3-unit kegiatan pokja II yang dijalankan yaitu: pelatihan menjahit, kerajinan tangan serta pelatihan memasak. Dimana setiap unit nya mendapatkan dana sesuai dengan kepentingan dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan, namun pendanaan sepenuhnya masih belum bisa mencukupi untuk kegiatan

pelatihan menjahit, pelatihan memasak dana yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, biasanya kegiatan pelatihan memasak dan kerajinan tangan ini dilakukan jika di tingkat kecamatan atau kabupaten mengadakan lomba dan dana yang diambil sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sehingga sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Penelitian ini mengacu terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang terkait dengan salah satunya adalah Penelitian (Pathony, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga belum optimal dilakukan di kabupaten sumbang dengan strategi pemberdayaan yang dapat diukur yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan dan penyokongan. Adapun kendala nya yaitu sumber daya yang kurang memadai serta kurangnya dukungan dari pemerintah desa setempat. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Aziz & Eriyanti, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pendidikan belum secara optimal dilakukan, adapun kendala nya kurangnya partisipasi masyarakat serta kurangnya semangat dalam menjalankan kegiatan PKK oleh anggota PKK dan pengetahuan yang masih kurang. Penelitian juga pernah dilakukan oleh (Nurfadillah, 2019) yang menyatakan Program UP2K-PKK sudah cukup berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kayuambon Lembang, namun harus lebih aktif, inovatif dalam melaksanakan program tersebut sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama meneliti tentang implementasi dan pengelolaan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dan saat ini. Fokus penelitian tentang dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan PKK di desa Suak Puntong terutama kesejahteraan keluarga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembuatan dari kebijakan tersebut atau pelaksanaannya dapat menyejahterakan keluarga. Dalam penelitian ini pertanyaan peneliti dimaksud mengenai bagaimana implementasi PKK program bidang pendidikan dan keterampilan yang ada di desa suak puntong.

METODE

Metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan pemanfaatan serta mempelajari keadaan sosial suatu individu maupun sekelompok masyarakat yang permasalahannya berasal dari sosial kemasyarakatan (Cresswell, 2016). Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dimana dalam penelitian peneliti memahami permasalahan dengan melihat sehingga dapat mengumpulkan informasi-informasi yang dimiliki secara lengkap dan akurat. Suatu kegiatan, peristiwa yang terjadi, kegiatan maupun prosedur merupakan suatu kasus (Cresswell, 2016).

Penelitian ini data yang digunakan berupa data primer yaitu berupa wawancara kepada pihak terkait serta melihat langsung dengan observasi di lapangan dan juga menggunakan data sekunder berupa data-data yang dimiliki oleh pemerintah desa Suak Puntong dan PKK desa suak puntong yang berupa hasil penelitian terdahulu. Berikut pada tabel 1 data primer penelitian yaitu:

Nama	Jabatan	Jumlah
Saifuddin AR	Kuchik/Pemimpin Desa	1
Nur Dewi	Kasi Pemerintahan	1
Tgk M. Hasyim Bilal	Kepala Dusun Simpanga	1
Drawiyah	Ketua Umum PKK	1
Lidarna	Ketua I PKK	1
Umi Kalsum	Ketua Pokja II	1
Azizah	Anggota PKK	1
Mariana	Warga	1
Jamaliah	Warga	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Suak Puntong terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Permai, Dusun Simpanga, Dusun Kelambe dan Dusun Gelanggang Merak dengan jumlah penduduk 983 jiwa, mayoritas bermata pencaharian penduduknya dalam sektor perkebunan yaitu menjadi petani kebun, pedagang, pekerja swasta sebagian kecil pegawai di kantor pemerintahan. Desa atau kelurahan merupakan dibawah kecamatan, kalau di aceh Desa dibawah kecamatan itu disebut dengan mukim dan baru gampong atau kelurahan dengan skala terkecil atau organisasi lebih kecil.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Suak Puntong terdiri sekelompok kerja diantaranya pokja II yaitu melatih serta meningkatkan kemampuan masyarakat terkhusus bagi perempuan yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak, menjadikan perempuan mandiri dalam segala hal. Program pelatihan menjahit, kerajinan tangan serta pelatihan memasak. Pelaksanaan pokja II merupakan bagian dari 10 program pokok PKK yang telah ditetapkan merupakan tanggungjawab dari pokja II PKK yang merupakan hal penting dalam pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Desa Suak Puntong juga mempunyai aset PKK yaitu perkebunan kelapa, pelaminan, barang pecah belah dan ayunan. Pengelolaan aset PKK pecah belah disewakan kepada masyarakat baik itu kepada masyarakat Suak Puntong sendiri dengan harga sewa sebesar Rp.200.000 dan kepada desa lainnya sebesar Rp.350.000, dengan demikian sangat bermanfaat dimana PKK dapat memperoleh uang dari hasil aset yang disewakan dalam setahun sebesar 2.000.000 sesuai dengan seberapa banyak orang yang menyewakan aset PKK pecah belah. Dengan demikian dalam diperlukan pendidikan serta pemahaman dalam menjalankan kegiatan yang ada di pokja II dan kemampuan untuk mengelola modal asset tersebut begitu juga kegiatan yang ada di pokja II sehingga mampu memberikan keuntungan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelatihan keterampilan yang telah dilakukan dan diberikan oleh PKK desa Suak Puntong diantara nya pelatihan menjahit bagi masyarakat, pelatihan memasak, membuat keranjang hantaran pernikahan, merangkai sirih khas Aceh serta merangkai bunga dan keterampilan tangan lainnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Demikian sesuai dengan tujuan program. Menurut Bapak Saifuddin AR selaku Kepala Desa menyatakan bahwa "Kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat terutama perempuan desa suak puntong sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga sebagai ini terkecil dalam pembangunan menjadi keluarga yang mandiri dan maju. Dari kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan

pelatihan ini merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan masyarakat dari pelatihan-pelatihan yang diberikanlah kepada masyarakat desa suak puntong". (Wawancara dengan Penanggung Jawab Desa, 24 Oktober 2021).

Pelaksanaan pokja II PKK dapat dideskripsikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan pokja lainnya yang terdapat di Desa Suak Puntong. Dalam implementasi kebijakan pokja II melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit di salah satu rumah ketua PKK yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Pelatihan memasak serta kerajinan tangan dilaksanakan ketika beberapa hari akan diadakan lomba baik ditingkat Desa maupun kecamatan/kabupaten.

Dengan demikian, tahap perencanaan, pembahasan, serta tempat melaksanakan kegiatan dilaksanakan dengan baik. namun kegiatan PKK masih harus ditingkatkan yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dari PKK terutama Pokja II mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu warga Desa Suak Puntong Ibu Jamaliah, mengatakan bahwa: "*Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatan-kegiatan yang telah dibuat mengalami kelemahan, dimana pada tahun sebelumnya kegiatan PKK baik itu pokja-pokja memiliki berbagai program kegiatan, namun sekarang kegiatan pokja-pokja tersebut berkurang diakibatkan selalu adanya pergantian kepala desa menjadi Penanggung Jawab (PJ) setiap periode sehingga mengakibatkan pergantian anggota PKK yang memiliki kegiatan-kegiatan, cara kerja serta tujuan yang berbeda yang ingin dicapai sbelumnya. Ini mengakibatkan kebijakan yang telah ada tidak berhasil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya*" (Wawancara, 12 November 2021)

Implementasi kebijakan berhasil atau tidaknya ditentukan oleh banyak faktor/variabel yang berkaitan. Dalam observasi, peneliti menggunakan ukuran implementasi model menurut Van Metter dan Van Horm ada 6 (enam) variabel/unsur yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam implementasi kebijakan PKK. Kecil kemungkinan keberhasilan dalam implementasi kebijakan/program jika sumber daya tidak memadai sehingga program tidak berjalan dengan baik. sejalan dengan pendapat (Putri Kula Sari, 2021) proses implementasi berhasil tidaknya dilakukan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimiliki oleh implementor dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sumber daya memiliki 3 (dua) sub indikator yaitu sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran, yaitu:

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting keberhasilan suatu program yang dijalankan. Penggerak dari mengimplementasikan suatu kebijakan yang ada dalam menunjang keberhasilan dari suatu program ialah manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yaitu para pengelola PKK dan masyarakat tersebut. Mengenai pengelola PKK masih belum memadai dilihat dari anggota PKK yang masih belum memahami apa yang menjadi kewajiban masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan selain itu juga dalam implementasi kebijakan

pokja II pendidikan dan keterampilan kegiatan-kegiatan tidak sepenuhnya dijalankan, kegiatan tidak terstruktur yang diakibatkan oleh sumber daya kurang kompeten. Sistem rekrut PKK hanya dari rasa kesadaran sosial masyarakat saja tidak adanya seleksi yang jelas dan transparan yang mengakibatkan kurang tepatnya penempatan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan agar PKK dapat berjalan dengan lancar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor utama yang paling terpenting dalam memajukan kegiatan, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Menurut (T.Lomboh, 2014) mengemukakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah Desa namun tanggungjawab masyarakat juga terhadap kepedulian nya akan pentingnya pembangunan guna untuk mewujudkan kepentingan bersama, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengembangkan dan membentuk kekuatan bersama sehingga masyarakat ikut berperan mulai dari perencanaan program hingga evaluasi program yang telah dilakukan.

Tujuan PKK guna menyejahterakan masyarakat menjadi akan tercapai karena faktor penggeraknya kurang berpartisipasi yang membuat tujuan yang ini dicapai oleh PKK juga tidak akan tercapai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Widyawati, 2021) tujuan adanya PKK dibentuk adalah untuk memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKK mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Tujuan utama adanya kegiatan PKK adalah keluarga (Shalfiah, 2017). Sebagian masyarakat desa suak puntong masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK dan kurangnya respon masyarakat program PKK yang dijalankan oleh PKK desa suak puntong tersebut.

Sumber daya Anggaran

Ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi proses implementasi kebijakan yang menjadi faktor penting yang juga harus dibutuhkan. Fasilitas berupa anggaran yang cukup menjadi nilai tambah bagi para implementor dalam menjalankan suatu program untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan yang ada (Sari, 2021). Sumber daya anggaran yaitu sumber daya mengenai dana sesuai dengan kebutuhan dengan perencanaan-perencanaan yang diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu untuk pengalokasian dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fakta lapangan menunjukkan sumber daya yang dimiliki belum memadai. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Ibnu Hakim selaku kaur menyimpulkan bahwa sumberdaya anggaran PKK tidak dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan hal ini disebabkan karena BLT sehingga dana untuk PKK berkurang. Dan sumberdaya anggaran juga terhambat disebabkan berproses pengaturan sumberdaya nya itu selalu bertukar.

Sumber daya fasilitas

Sumber daya fasilitas juga sebagai pendukung dan penunjang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana dalam kegiatan program pokja II salah satunya yaitu mesin jahit dan alat yang dibutuhkan lainnya serta tempat yang dipergunakan dalam kelangsungan

kegiatan yang dilakukan yaitu rumah warga anggota PKK dan kantor desa. (Wawancara, 20 November 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan terkait dengan sumber daya manusia belum memadai sehingga dibutuhkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi dan penempatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber daya anggaran mampu mencukupi dengan adanya hasil dari sewa menyewa pecah belah sebagai aset PKK yang mampu menutupi kebutuhan dana yang ada selama proses kegiatan PKK dimasa pandemi covid 19, sumber daya fasilitas sudah memadai, namun sumber daya fasilitas belum memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan yang dilakukan di pokja II sehingga sudah berhasil.

Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pengelola program PKK kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat pengelola PKK mengetahui bahwa suatu keputusan yang telah dibuat harus dilaksanakan, sehingga pengelola dapat bekerja sesuai dengan wewenang masing-masing. Implementasi akan berhasil atau tidaknya dicapai dipengaruhi oleh hubungan yang terjalin yaitu komunikasi, koordinasi dan dukungan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam mencapai keberhasilan suatu program tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kasi Pemerintahan Suak puntong Nur Dewi dijelaskan bahwa: *"Terkait dengan programnya yang akan dilakukan disampaikan oleh ketua maupun anggotanya melalui penyamai secara langsung dan sosialisasi di dalam rapat kerja atau rapat koordinasi yang dilakukan bersama instansi"*. (Wawancara, 10 Desember 2021)

Selain itu ibu mariana salah satu masyarakat desa suak puntong mengatakan bahwa: *"Para pengelola PKK jika ada program PKK yang akan dilaksanakan seperti lomba-lomba yang akan diikuti pengelola memberitahukan secara langsung ke rumah-rumah masyarakat dan pemberitahuan saat masyarakat berkumpul seperti acara yasinan pada hari Jum'at, dan acara arisan"*. (Wawancara, 12 Desember 2021).

Dengan ini dapat di ambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan PKK pokja II dilakukan secara langsung, lewat rapat dan lewat kegiatan-kegiatan rutin yaitu acara yasinan dan arisan para Ibu-ibu. Dengan demikian dinilai sudah terjalinnya komunikasi yang baik dengan instansi terkait dan masyarakat desa Suak Puntong.

Sumber Daya Komunikasi Disposisi

Sumber daya komunikasi yaitu teknis menjalankan tugas. Disposisi atau sikap dari pengelola atau pelaksana suatu kebijakan yang sudah dibuat merupakan aspek penting dalam suatu strategi yang dilakukan dalam efektifitas implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian efektifitas pelaksanaan suatu kegiatan disertai para pelaksana kebijakan juga harus mempunyai kemampuan bukan hanya mengetahui saja sehingga tidak terjadinya penyimpangan. Dalam pemilihan anggota pelaksana kebijakan tersebut sebaiknya yaitu orang-orang yang mengutamakan kepentingan warga dengan dedikasi tinggi yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan sesuai yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Program pokja II dan implementasi kebijakan yaitu pelatihan menjahit, memasak dan keterampilan tangan dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat jelas sikap/disposisi kebijakan ketua PKK pokja II dalam pelaksanaan

kebijakan PKK tahun 2021 yang tentunya untuk kepentingan masyarakat terutama perempuan desa suak puntong di masa pandemi covid 19 disposisi/sikap terlihat mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat dan keluarga, dan penanggungjawab serta pelaksanaan program oleh ketua PKK dan seluruh anggota PKK yang terlibat. Para pengelola implementasi kebijakan memberikan sikap arahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dikhususkan bagi perempuan-perempuan desa dan menyejahterakan keluarga.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau karakteristik agen/badan-badan pelaksana merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, jika terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi maka implementasi tidak akan berhasil. Konsepsi dari struktur birokrasi yaitu seberapa berjalannya program tersebut yang mampu menunjang pelaksanaan suatu kebijakan tersebut sehingga mendapatkan apa yang dijadikan sasarannya. Adapun indikator dari struktur birokrasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah berkaitan formal maupun informal suatu badan dengan badan pelaksana kebijakan. Demikian ketua pokja II sebagai pihak yang melaksanakan program PKK pokja II.

Keterlibatan Antara Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Model implementasi kebijakan menurut Metter dan Van Horm adanya indikator keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik. adapun keterlibatan antara kondisi lingkungan politik yang ada, sosial serta perekonomian pada pelaksanaan pokja II yang terdiri dari unit pelaksanaan pelatihan menjahit, pelatihan, memasak dan keterampilan di desa Suak Puntong.

Penilaian kinerja pengelola dalam implementasi kebijakan publik yang harus perhatikan yaitu seberapa baik lingkungan eksternal dapat mendorong suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak di laksanakan. Lingkungan tersebut seberapa tidak mendukung akan berakibatkan suatu faktor kegagalan dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan demikian dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan haruslah terlebih dahulu memperhatikan lingkungan eksternal tersebut baik dalam pelaksanaan program kebijakan atau sebaliknya.

Keterlibatan lingkungan sosial salah satunya pada pelaksanaan pelatihan menjahit, pelatihan memasak dan kerajinan berdasarkan penelitian yang dilakukan program masyarakat pelaksanaan kegiatan mau tidaknya mengikuti/berpartisipasi langsung. Pelaksanaan PKK memiliki tujuan, sasaran kegiatan ini tidak ada batasan artinya semua perempuan desa suak puntong dapat berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak adanya kecemburuan sosial dari masyarakat. Hal ini dapat sehingga dapat mempererat silaturahmi serta memperkuat solidaritas masyarakat desa suak puntong dalam berkemasyarakatan.

Kondisi perekonomian Indonesia terlebih Aceh yang termasuk dalam kategori daerah termiskin di Sumatra. Pemberdayaan keluarga di Desa yaitu melalui PKK. Adapun keterlibatan lingkungan ekonomi terutama pada pelaksanaan kegiatan pokja II yaitu pelatihan menjahit, pelatihan memasak dan keterampilan tangan berdasarkan penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa program PKK terlebih pokja II apabila dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ini dibuktikan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan

menjahit sekarang mampu membuka usaha menjahit di rumahnya sehingga dengan kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi peluang usaha serta menghasilkan pendapatan masyarakat. Begitu juga dengan pelatihan memasak dan keterampilan bagi masyarakat.

Program pokja II selain keterlibatan di lingkungan sosial, ekonomi, pelaksanaan program juga keterlibatan lingkungan politik. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa secara politik peran dan fungsi dari pengelola pokja II belum sepenuhnya dijalankan berkesinambungan antara pengelola pokja II dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai. Dengan demikian dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan terlebih pokja II yang jarang dilaksanakan.

Standar Kebijakan dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan standar serta sasaran dari kebijakan merupakan faktor penting dalam tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Suatu standar kebijakan yang tidak menentu dan sasaran kebijakan terjadi akan jelas multi interpretasi serta akan mudahnya timbulnya permasalahan implementasi antar para pelaksanaannya. Oleh karena itu, standar ini seluruh kebijakan harus jelas dan tegas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya program PKK pokja II di Desa Suak Puntong di tengah pandemi covid-19 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat guna menyejahterakan keluarga, pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bahkan diharapkan dapat keterampilan masyarakat tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Hasil observasi penelitian dan pembahasan belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan terdapat adanya indikator kelancaran program yang terhambat di pokja II program pendidikan dan keterampilan yang sudah berjalan seperti pelatihan menjahit bagi masyarakat, pelatihan memasak, membuat kerajinan tangan taraf kehidupan lebih baik dapat ditingkatkan.

Pelaksanaannya yang menjadi penghambat dilihat dari PKK program pendidikan dan keterampilan yaitu rendahnya sumber daya manusia sebagai penggerak pengelolaan kebijakan yang masih kurang berkompeten, sarana dan sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan dalam menyelesaikan tulisan ini, terimakasih kepada keluarga dan orang tua yang telah memberikan semangat disetiap langkah serta do'a kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen-dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Tidak lupa juga berterimakasih kepada keuchi/kepala Desa, Tuha Peut/lembaga adat Desa dan juga seluruh aparat desa serta masyarakat yang berkorupsi dan memudahkan di dalam mendapatkan keterangan serta data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan

REFERENSI

Afandi, Mohammad Ibnu, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor II Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat).

- Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 5(2), 92–113.
- Amin, K. (2018). Pengaruh konflik terhadap pembangunan pendidikan di Aceh. 1(2), 159–176.
- Anggraini, D. (2016). PEREMPUAN DESA (Studi Kasus Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Tahun 2016).
- Aziz, M. A., & Eriyanti, F. (2020). Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan dan Program Pengembangan Kehidupan Beroperasi Oleh PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 201. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1.202>
- Cresswell, A. william. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Pustaka pelajar.
- Dedi Saputra, M. (2015). Analisis Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 1–9.
- Fajri, I., Sundawa, D., Zailani, M., Yusoff, M., & Indonesia, U. P. (2021). PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial , Universitas Pendidikan Indonesia , Bandung , Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> Salah satu aspek terutama dalam. 9(3), 710–724.
- Fuady, I. (2016). Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 34–37. journrdharmakarya/article/viewFile/11437/5233a.unpad.ac.id/
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>
- Kartawidjaja, D. (2018). Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Alfabeta.
- Mardhiah, N. (2017). Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 77–88. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.753>
- Nasution, E. (2016). Problematika Pendidikan di Indonesia Oleh : *Urnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1–10.
- Nurfadillah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2430>
- Pakudek, M. . , Wangke, W. M., & Susana, B. O. L. (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Peningkatan Kapasitas Perempuan Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 213. <https://doi.org/10.35791/agrsosok.14.3.2018.22222>
- Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, 1(2), 262–289. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020. (2020). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. In *Akrab Juara* (Vol. 5, Issue 1, pp. 43–54). <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>

- Rahmawati, D. (2019). Implementansi Program Kerja PKK Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- RI, P. (2003). Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI]. *JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 37. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Sari, P. K. (2021). *Journal of Social and Policy Issues Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak*. 3.
- Shalfiah, R. (2017). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*, 1(3), 975–984. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/92>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- T.Lomboh, A. (2014). Merupakan Skripsi Penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado 1. *Fisip Unsrat*, 1–10.
- Widyawati, F. (2021). Available online at : Fransiska Widyawati COLABORATION BETWEEN CAMPUS AND THE PKK Kampus memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat di sekitar lingkungan Kemajuan masyarakat harus menjadi kepedulian, keprihati. 4(3).
- Yayan Alpian, Sri Wulan Anggraeni, Unika Wiharti, & Nizmah Maratos Soleha. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>